

DINAMIKA PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI ERA *POST* – *TRUTH*: ANALISIS KASUS INTOLERANSI ANTARA PENDETA DAN ROMO DI PLATFORM FACEBOOK DAN TIKTOK

Yoel Y Baunsele¹, Frangklin Pormes², Anderias Momot³, Selfiana Kalami⁴, Agustina Siahaya⁵, Demisius Momot⁶

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Email: yoelbaunsele@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pendidikan Agama Kristen di era post-truth melalui kasus intoleransi antara pendeta dan romo di media sosial, khususnya pada platform Facebook dan TikTok, serta mengkaji implikasinya terhadap relasi antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Era post-truth ditandai dengan dominasi opini dan emosi dibandingkan fakta objektif, yang berdampak pada cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu keagamaan di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori ruang publik Habermas dan pluralisme agama Jhon Hick, serta studi literatur dari buku dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital menjadi tempat baru bagi ekspresi keagamaan yang bersifat edukatif, tetapi juga profokatif. Algoritma Facebook dan TikTok cenderung mempercepat penyebaran narasi konflik dan tulisan yang kontrafactual. Fenomena yang terjadi di platform mencerminkan intoleransi antara Protestan dan Katolik. Konflik antar umat beragama tersebut dapat direduksi melalui kasih, saling menghargai tidak membawa doktrin yang menimbulkan pemecahan serta etika komunikasi di media sosial yang manusiawi. Dengan demikian penelitian ini merekomendasikan pentingnya etika komunikasi di ruang publik yang sesuai dengan ketentuan, integrasi nilai – nilai pluralisme dalam pendidikan, membentuk generasi yang kritis dan inklusif serta merepresentasikan nilai – nilai kasih yang universal. Dengan demikian, Pendidikan agama Kristen di era digital diharapkan tetap berfungsi sebagai sumber kedamaian dan bukan sebagai pemicu konflik.

Kata Kunci: PAK, Post-Truth, Media Sosial, Konflik Keagamaan, Literasi Digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of Christian Religious Education in the post-truth era through cases of intolerance between pastors and priests on social media, particularly on Facebook and TikTok, and examine its implications for interfaith relations in East Nusa Tenggara. The post-truth era is characterized by the dominance of opinion and emotion over objective facts, which impacts how society understands and responds to religious issues in the digital space. The research method used is qualitative, using the approach of Habermas's public sphere theory and John Hick's religious pluralism, as well as literature studies from books and journal articles. The results of the study show that the digital space has become a new place for religious expression that is educational, but also provocative. Facebook and TikTok algorithms tend to accelerate the spread of conflict narratives and contradictory writings. The phenomena that occur on the platforms reflect intolerance between Protestants and Catholics. Conflicts between religious communities can be reduced through love, mutual respect, not bringing doctrine that leads to solutions, and humane communication ethics on social media. Thus, this research recommends the importance of ethical communication in public spaces that comply with regulations, integrate pluralistic values into education, and foster a critical and inclusive generation, while representing universal values of love. Therefore, Education religion Crhristian in the digital age is expected to continue to function as a source of peace and not a trigger

for conflict.

Keyword: *Post-Truth, Social Media, Religious Conflict, Digital Literacy.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini, khususnya media sosial seperti facebook, instagram, youtube, whatsapp dan Tiktok secara signifikan mengubah cara individu berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun opini publik. Ruang digital yang semula menjadi wadah bersosialisasi dan saling bertukar gagasan justru kini berubah menjadi arena konflik, termasuk dalam konflik Agama dan polarisasi agama (Alfazri & Syahputra, 2024). Fenomena ini semakin kompleks ketika dihubungkan dengan dunia masyarakat kontemporer atau yang sering disebut dengan era post-truth. Kamus Oxford mendefinisikan istilah post-truth sebagai kondisi sebagaimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik sehingga emosi, keyakinan pribadi dan identitas kelompok menjadi dominan. Istilah Post-truth pertama kali digunakan pada tahun 1992 yang diungkap oleh Steve Tesic di majalah *The Nation* ketika merefleksikan kasus perang antara Iran dan Teluk. (Syuhada, 2018). Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, situasi ini dapat memicu munculnya diskursus sosial, intoleransi Agama dan sikap eksklusivitas. Akibatnya, dialog antar umat beragama yang seharusnya dilandasi oleh toleransi dan penghargaan kini digantikan dengan polemik dan konflik verbal di platform digital. Roja (2004) dalam (Martini & Kaize, 2025) menyatakan bahwa media sosial menjadi arena baru bagi kelompok – kelompok untuk mempertahankan ajaran agamanya dengan cara yang konfrontatif. Di era Post-Truth fenomena ini terus terjadi setiap hari yang mengakibatkan konflik antar agama dalam masyarakat di ruang digital seperti facebook dan tiktok.

Jurgen Habermas adalah seorang filsuf dengan teori kritisnya menekankan pada kesetaraan antara penguasa dan kaum lemah. Dalam perspektif habermas menekankan dialog kebersamaan untuk mencapai kesepakatan dalam kepentingan tertentu (Habermas, n.d.). selain itu Jhon Hick dalam teorinya pluralisme agama memberikan stigma penting dengan menganggap semua agama adalah sama namun berbeda dalam perjalanan dalam mengerti Allah. Ia menggambarkan Allah bagaikan matahari yang dikelilingi bumi sehingga menjula gagasan Allah itu ada (*the Real*) (Hick, 1985). Dalam perspektif kedua tokoh ini agama dapat diintegrasikan dengan nilai – nilai dan etika untuk saling mengerti dan mengasihi sebagai bagian dari toleransi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hick bahwa perbedaan diciptakan oleh Allah untuk mengerti arti keberagaman.

Salah satu fenomena yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah manifestasi dari kerukunan menjadi diskursus etika literasi bermedia sosial. Dimana para pemuka agama di Nusa Tenggara Timur, seperti Pdt Jhon Lodowik David, sering beradu argumentasi, saling sindir melalui postingan – postingan tentang doktrin Katolik dan protestan di Facebook dan Tiktok, dengan Romo Katolik yang bernama Patris Alegro. Fenomena ini bermula dari Romo Patris Alegro yang mengklaim Agama Katolik sebagai agama yang sah dan agama yang memegang kunci kerajaan Sorga, sementara menyudutkan Agama protestan sebagai bidat yang dianatema pada konsili Trente. Kasus ini menuai kecaman publik dan berbagai macam komentar yang tidak mengedepankan toleransi beragama sehingga netizen ikut terprovokasi dan mengakibatkan konflik ruang digital yang serius. Oleh karena itu, Kasus ini tidak hanya mencerminkan persoalan individu, tetapi juga menunjukkan adanya problem struktural dalam cara agama dipahami dan dikomunikasikan dan bahkan berakibat fatal bagi dunia pendidikan Agama Kristen di ruang publik secara digital. Ketika tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam konflik terbuka, hal ini berpotensi memperkeruh relasi antar umat beragama serta memengaruhi persepsi para peserta didik terhadap nilai-nilai toleransi dan kasih.

Selain itu, fenomena ini juga mengindikasikan adanya pergeseran otoritas keagamaan. Di era digital, otoritas tidak lagi sepenuhnya berada pada institusi resmi, melainkan tersebar dan sering kali dipengaruhi oleh popularitas serta kemampuan retorika di media sosial. Hal ini membuka peluang bagi munculnya narasi-narasi keagamaan yang tidak selalu konstruktif, bahkan cenderung provokatif. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang majemuk Agama, dinamika ini menjadi sangat penting untuk dikaji. Keharmonisan antar umat beragama merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di daerah NTT. Oleh karena itu, konflik verbal di ruang digital, sekecil apa pun, perlu dipahami secara kritis agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di dunia nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pendidikan Agama Kristen di era post-truth melalui studi kasus saling ejek antara pendeta Protestan dan romo Katolik di platform Facebook dan Tiktok. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memicu konflik, peran media sosial dalam memperkuatnya, serta implikasinya terhadap Pendidikan Agama Kristen dan relasi antarumat beragama. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan refleksi kritis dan kontribusi dalam membangun komunikasi kependidikan yang lebih etis, dialogis, dan inklusif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa postingan – postingan baik video dan tulisan berupa sindiran doktrin di media sosial seperti platform Facebook dan Tiktok. Creswell dalam (P et al., 2023) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena, kelompok dan individu yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengkaji dari sumber – sumber literasi seperti buku dan Artikel Jurnal (library search) selanjutnya menurut Creswell dalam (Pahleviannur et al., 2022) studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami suatu isu. Dengan demikian maka penelitian ini berfokus pada fenomena diskursus narasi dalam ruang digital dalam Pendidikan Agama Kristen. Teknik pengumpulan data dimulai dengan melihat postingan video dan tulisan di Facebook. Kemudian direduksi menggunakan teori ruang publik Jurgen Habermas dan teori pluralisme Agama Jhon Hick.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Post-Trusth

Istilah Post-Trusts adalah konsep yang masih diperdebatkan hingga kini. Melalui kemunculan teknologi digital telah menarik banyak pihak baik jurnalis, sosiolog, filsuf dan para ilmuwan politik merasa mempunyai tanggungjawab dan kepentingan politik untuk memberikan klarifikasi konseptual karena tantangan global yang terusik oleh disrupsi digitalisasi (Haq, 2022). Sekalipun banyak perdebatan namun istilah post-trusth merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh Oxford English Dictionary yakni fakta objektif yang kalah pengaruhnya dibanding opini dan emosi (Dictionary, 1989). Pengertian inilah yang kemudian menentukan para ilmuwan untuk menyortir data penelitian serta membela pihak yang mempunyai komitmen terhadap kebenaran yang mutlak, dan pada derajat tertentu dapat mendeskreditkan pihak lain yang teridentifikasi komitmen terhadap opini dan emosi. Artefak – artefak seperti berita bohong, hoaks, ucapan yang dipelintir sering ditautkan dibawa payung post-trusth. Sementara di pihak lain para ilmuwan berasumsi bahwa post-trusth ditimbulkan melalui gelembung informasi dan ciptaan algoritma media sosial. Pengertian post-trusth yang ditawarkan oleh OED cukup kompleks dan memadai untuk mengelaborasi medan komunikasi yang kompleks serta menopang literasi digital di ruang publik tentang emosi, pelintiran dan kebohongan (Haq,

2022).

Sementara di pihak lain definisi post-trusth yang ditawarkan oleh Steve Fuller mengkritik OED. Menurut Fuller definisi OED mengandung bias kekuasaan. Fuller memandang dikotomi fakta dan emosi membuka ruang legitimasi bagi orang yang mendiskreditkan individu atau kelompok tertentu. Perbedaannya terletak pada rezim pengetahuan yang berkuasa. Oleh karena itu menurut Fuller bukan tentang fakta dan emosi, melainkan tentang mana kebenaran resmi dan kebenaran tidak resmi (Fuller, 2018). Dalam konteks abad 21, dikotomi Fuller merepresntasikan perbedaan kebenaran antara saintifik, pemerintah, sosio-kultural berada di satu pihak sedangkan kebenaran partisipan, kospirasi dan sejenisnya di lain pihak. Fuller kemudian meninjau ulang pengertian post-trusth agar konsep yang didesain tidak melahirkan produk penelitian yang punya potensi untuk melegitimasi diskriminasi (Fuller, 2018). Merujuk pada pengertian diatas makan post-trusth dapat didefinisikan sebagai pandangan yang tidak sesuai dengan fakta dan emosi terutama hal – hal yang terjadi di ruang digital seperti diskriminasi, polarisasi antara individu dan kelompok di media sosial.

Dalam konteks kasus intoleransi antar pemuka agama di facebook dan Tiktok, emosi dan opini mempengaruhi kebenaran. Kebenaran menjadi ruang legitimasi untuk merancang polarisasi antar Agama di media sosial. Pergeseran paradigma ini dapat direduksi dengan pemikiran kristis agar tidak terkontaminasi dan membangun diskursus bahasa dan kekuasaan antar umat beragama. Dalam konteks ini debat publik hanya tergantung pada narasi identitas, visualisasi simbolik dan slogan – slogan simplistik yang memanipulasi afek kolektif. Maka kebenaran tidak dapat dipahami sebagai proposisi yang valid secara kolektif melainkan sesuatu yang terasa benar dalam rana subjektifitas (Waston, 2025).

2. Ruang Publik dalam perspektif pluralisme Agama

Secara ontologi istilah ruang publik mengalami perubahan dalam bentuk dan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat Yunani, ruang publik diartikan secara sederhana yaitu suatu kehidupan bersama. Pembagian struktur menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah masyarakat kelas bahwa (budak), prajurit, dan kelas bangsawan tidak ada ruang kebebasan untuk hidup bersama dalam satu komunitas atau tidak mendapat hak yang sama di dalam ruang publik. Perkembangan konsep tersebut secara kapitalism menjadi suatu ruang yang memebedakan antara kaum lemah dan kaum yang kuat (Supriadi, 2017). Dalam kondisi yang tak sama istilah ruang publik menurut Habermas (1989) menyatakan bahwa kondisi ini berbeda dengan yang ditemukan di Roma kuno dimana kategori wilayah secara publik dan privat sudah dipisahkan. Menurutnya ruang publik dipahami sebagai *res publica* (*res:urusan*) dan (*Publica:umum*) jadi ruang publik dapat dipahami sebagai urusan untuk mencapai kepentingan bersama, hajat hidup bersama, atau hidup dalam hak yang sama (Habermas, 2015). Ruang publik yang muncul sekitar awal abad ke-18 dan ke-19 ini digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dan individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik yang muncul dalam konteks kekuasaan. Mediasi ruang publik juga mencakup kontradiksi yang sering digambarkan antara kepentingan borjuis di satu pihak dan kepentingan warganegara di lain pihak. Tujuan mediasi ruang publik adalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan dan pendapat pribadi tersebut, dan akhirnya menemukan kepentingan umum serta mencapai konsensus bersama (Noor, 2012).

Konsep ruang publik menurut Jurgen Habermas adalah yang pertama, semua warga negara mampu untuk berkomunikasi dan memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di ruang publik. Kedua, semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai sebuah konsensus yang fair, dan memperlakukan orang lain sebagai individu yang otonom dan bertanggungjawab, bukan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. ketiga, terdapat aturan

bersama yang melindungi proses komunikasi terhadap tekanan – tekanan dan diskriminasi sosial, sehingga argumen yang baik menjadi dasar diskusi (Noor, 2012). Dengan kata lain Habermas mengedepankan dialog yang terbuka namun membutuhkan partisipasi dan etika yang akuntabel untuk mencapai suatu konsensus yang edukatif dan transparan, tidak menyudutkan pihak tertentu demi mencapai suatu kepentingan. Dalam konteks agama konsep ruang publik Habermas mereduksi dialog diskriminasi yang diutarakan di ruang digital secara verbal. Etika dan moral dalam ruang digital perlu diperhatikan agar menjadi santun dan bernilai.

Selain itu perspektif pluralisme Agama oleh Jhon Hick menganggap semua agama adalah pencari kebenaran yang bermuara pada Allah melalui jalan yang berbeda. Hick memulai teorinya dengan meminjam teori coperikus “matahari merupakan pusat tata surya yang mengelilingi bumi”. Teori ini menganggap bahwa semua agama adalah sama dan Allah sebagai pusat sesembahan semua Agama. Selanjutnya ia mengedepankan istilah Transendental yang menganggap bahwa Allah lebih tinggi dari semua unsur dan semua agama tidak dapat mengerti Allah dengan sempurna. Dengan demikian maka Hick tetap percaya keberadaan Allah sebagai (The Real) dan menjadi respon semua agama (Hick, 1985).

3. Studi Kasus saling mengejek di Facebook dan Tiktok

Beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan berbagai macam postingan baik secara tulisan maupun video yang diunggah di Facebook maupun Tiktok. Hal ini bermula dari seorang tokoh agama katolik Romo Patris Algo yang sering mengklaim Agama Katolik adalah Agama yang benar sedangkan protestan adalah bidat yang keluar jalur dan menjadi agama yang menyesatkan umat. Hal ini secara historis berawal dari peristiwa reformasi pada tahun 1715 seorang pastor Marthin Luther yang berani menyuarakan kebenaran dan kebebasan bagi umat di Jerman dengan menempelkan 95 dalil di gereja Witenberk Jerman. Dari 95 dalil yang dikemukakan oleh Marthin Luther dirangkum menjadi tiga dasar penting yaitu Sola Scriptura, Sola fide dan Sola Gracea. Hal inilah yang memicu konflik antara Romo Patris dan bermuara pada ketidak sabarannya di media sosial dan mengklaim agama katolik adalah agama satu – satunya yang benar karena mempunyai dasar hirarkis dari Paus Petrus. Hal demikian ditanggapi seius oleh pemuka agama protestan Jhon Lodowik David yang adalah pendeta di Gereja Kristen Sumba, selain itu juga ada Pdt Esra Soru, Pdt Deki Nggadas dan lain-lain yang membela diri (berapologet) bahwa agama protestan mendapat hak yang sama untuk selamat namun berdiri atas tiga prinsip Mathen Luther dan menolak Magisterium serta tradisi Katolik yang tidak Alkitabiah. Hal ini menjadi pertontonan publik hingga saat ini, sehingga setiap hari postingan – postingan tersebut beriring bermunculan di beranda Facebook dan Tiktok. (sumber Fecebook dan Tiktok tanggal 20 Maret 2026).

4. Etika komunikasi di Era Post-Trusth dari perspektif Pendidikan Agama Kristen

Dalam perspektif Habermas dan Jhon Hick (Hans Lura, 2024) Agama Kristen baik katolik dan protestan merupakan sebuah manifestasi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu semua manusia yang berada dalam agama Kristen mempunyai hak yang sama untuk menghidupi karya Allah. Dalam hal ini ruang publik menjadi tempat bersosialisasi dan berbagi gagasan yang membangun karya keselamatan Allah bukan menjadi ruang konflik yang memisahkan anatara Katolik dan Prostestan (Muzakki, 2024). Perbedaan doktrin seperti menganggap maria adalah Wanita suci dan api penyucian serta indulgensi bukan menjadi konsumsi publik. Untuk itu perlu menjaga esensi ruang digital untuk tetap kondusif sebagaimana yang diamanatkan Oleh Yesus dalam Matius 28:19-20 “ Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus”. Selanjutnya di platform digital seperti Fecabook dan Tiktok menjadi ruang dimana saling berinteraksi untuk menyuarakan kasih universal (Yohanis 3:16) serta mengkapanyekan manusia sebagai gambar Allah dalam konsep Imago Dei (Kejadian 1:26).

Dalam studi (Dasopang et al., 2025) menyatakan bahwa Agama Kristen dan katolik mempunyai ajaran yang sama mengenai kasi universal, dengan mengutip (Markus 12:30-31 dan Matius 7:12) menjadi landasan kehidupan kekristenan.

Selanjutnya Teori Hick menjadi fondasi bagi perbedaan Agama di NTT (Katolik, Protestan dan Islam) agar agama dipandang sebagai kasih karya Allah yang menyelamatkan umat manusia, dan perbedaan sebagai Anugerah Allah untuk saling mengerti satu sama lain tanpa saling menyalahkan. Secara khusus antara jemaat Katolik dan Protestan merupakan dua agama yang percaya satu Allah dan satu Juruselamat yaitu Yesus Kristus. Oleh karena ini ruang digital menjadi ruang yang relevan di era Post-Trusth untuk menyuarakan kasih, kebenaran dan keadilan bagi semua orang secara holistik tanpa memandang Agama, ras dan golongan agar mencapai konsesus Ilahi dan memperluas kerajaan Allah (Rifai et al., 2023). Ada beberapa prinsip dalam berkomunikasi di media sosial yaitu : 1). Hormati privasi dan kerahasiaan, 2). Jangan mengganggu orang lain, 3). Berbicara tanpa menghakimi, 4). Efektif dan efisien, 5). Saling menghargai, 6). Taat pada standar ketentuan online (Ginting et al., 2021). Merujuk pada prinsip tersebut makan dalam kasus intoleransi yang dilakukan oleh Romo Patris Alegro dan Pdt Jhon Lodowik David memperhatikan doktrin yang spesifik di ruang digital untuk mereduksi ketimpangan sosial dan konfrontasi masal. Konflik yang terjadi di platform Facebook dan Tiktok sangat tidak mencerminkan kasi yang universal, untuk itu hal ini kalau tidak dimengerti dengan kasih dan toleransi serta pemikiran kritis, makan akan menimbulkan konflik sosial antar Jemaat katolik dan Protestan dan akan menyusup sampai kepada dunia pendidikan Agama kristen karena platform Facebook dan Tiktok menjadi ruang publik tidak hanya kepada orang dewasa melainkan anak – anak.

5. Implikasi

a. Implikasi bagi Umat Beragama

Dinamika konflik verbal antar tokoh agama di media sosial seperti Facebook dan TikTok memiliki implikasi yang cukup serius dalam konteks kehidupan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur maupun di seluruh Indonesia. Sebagai wilayah yang dikenal dengan keragaman agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan kepercayaan lokal NTT selama ini relatif hidup dalam harmoni sosial berbasis nilai kekeluargaan dan budaya lokal. Namun, penetrasi media digital menghadirkan tantangan baru yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perlu adanya pemikiran Kritis, Bersikap terbuka antar umat beragama, Hindari dontrin yang memecah belah, Tidak gampang mengkonsumsi berita profokatif dan debat kusir dan yang paling penting adalah Saring berita sebelum shering .

Dari sisi keagamaan, implikasi yang muncul adalah terjadinya kebingungan teologis di kalangan umat. Banyak jemaat yang tidak memiliki dasar pemahaman doktrin yang kuat cenderung menerima informasi secara mentah dari media sosial. Akibatnya, perdebatan yang seharusnya bersifat akademis berubah menjadi konsumsi publik yang memecah belah. Hal ini juga dapat menurunkan wibawa tokoh agama sebagai pembimbing spiritual, karena mereka tidak lagi dipandang sebagai sumber kedamaian, melainkan sebagai bagian dari konflik.

b. Implikasi Bagi Pengguna Media Sosial

Secara sosial, konflik yang dipertontonkan di ruang digital berpotensi merembes ke dalam relasi nyata antar umat beragama. Masyarakat NTT yang memiliki ikatan komunal kuat dapat dengan mudah terpengaruh oleh narasi konflik yang viral, terutama jika melibatkan tokoh agama yang dihormati. Ketika pendeta dan romo saling mengejek secara terbuka, hal ini dapat memicu sentimen kelompok, memperkuat stereotip negatif, dan menciptakan jarak emosional antar denominasi Kristen maupun dengan agama lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko mengikis budaya toleransi yang telah lama terbangun.

Di sisi lain, fenomena ini juga dapat menjadi peluang reflektif bagi pembangunan dialog

antar umat beragama di NTT. Konflik yang muncul dapat dijadikan titik masuk untuk memperkuat komunikasi lintas iman, baik melalui forum resmi maupun pendekatan berbasis komunitas. Tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun narasi damai di ruang digital. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang konflik, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan rekonsiliasi.

c. Implikasi Bagi Pendidikan Agama Kristen

Implikasi lainnya terlihat dalam bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Kristen (PAK). Peserta didik yang aktif menggunakan media sosial berpotensi terpapar konten konflik keagamaan tanpa pendampingan yang memadai. Hal ini dapat membentuk pola pikir eksklusif, intoleran, dan mudah menghakimi kelompok lain. Oleh karena itu, lembaga pendidikan di NTT perlu merespons dengan mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mampu menyaring informasi serta mengembangkan sikap kritis dan inklusif.

Dengan demikian, implikasi dinamika agama di era post-truth di NTT tidak hanya berdampak pada hubungan antar individu, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Diperlukan kesadaran kolektif dan tindakan strategis untuk menjaga harmoni antar umat beragama agar tetap menjadi kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat NTT di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat.

KESIMPULAN

Dinamika agama di era post-truth menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam cara kebenaran diproduksi dan dipersepsikan, khususnya melalui media sosial seperti Facebook dan TikTok. Kasus saling ejek antara pendeta dan romo mencerminkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana pewartaan iman, tetapi juga arena kontestasi identitas, otoritas, dan popularitas. Dalam konteks ini, emosi, opini, dan kepentingan personal sering kali lebih dominan dibandingkan nilai kebenaran dan etika teologis.

Melalui fenomena intoleransi di ruang digital maka Teori ruang publik Habermas dan teori pluralisme Agama Jhon Hick menjadi penetralisasi perbedaan perspektif agama dan doktrin. Hal ini sesuai dengan mandat ilahi yang menekankan kasi universal dan pemuridan secara menyeluruh oleh kedua Agama tersebut. Melalui kedua teori ini maka agama dipahami bukan secara individu namun kelompok komunal yang berbeda arah namun satu tujuan untuk mensuksesi karya keselamatan Allah, baik Pdt dan Romo keduanya adalah rasul yang apostolik untuk memberitakan karya keselamatan.

Sebagai masyarakat dan jemaat sebaiknya perlu pemikiran kritis dalam menanggapi hal – hal tersebut. Saringlah setiap berita sebelum berkomentar baik melalui facebook maupun tiktok. Karena penyerangan verbal hari ini menentukan prinsip toleransi yang wajah Agama yang kita imani. Sebagai langkah konstruktif, penguatan literasi digital, pengembangan dialog lintas denominasi, serta integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Kristen—menjadi sangat penting. Upaya ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Dengan demikian, tantangan era post-truth tidak dapat dihindari, tetapi dapat direspons secara bijaksana. Agama perlu kembali diteguhkan sebagai sumber perdamaian dan pemersatu, sehingga kehadirannya di ruang digital tetap memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bersama yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfazri, M., & Syahputra, J. (2024). Literasi digital dan etika komunikasi dalam konteks media sosial. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(2), 50–62.
- Dasopang, I., Syarah, S., Arifin, M. K., Silalahi, A. V., & Siregar, F. H. (2025). Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Islam, Katolik, dan Protestan. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 4392–4407.
- Dictionary, O. E. (1989). *Oxford english dictionary*. Simpson, Ja & Weiner, Esc, 3.
- Fuller, S. (2018). *Post-truth: Knowledge as a power game (Vol. 10)*. Anthem Press London.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., PS, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika komunikasi dalam media sosial: Saring sebelum sharing (Vol. 1)*. Penerbit Insania.
- Habermas, J. (n.d.). *HABERMAS DAN HERMENEUTIKA KRITIS. KITAB SEJARAH*, 85.
- Habermas, J. (2015). *Knowledge and human interests*. John Wiley & Sons.
- Hans Lura. (2024). *Jurnal PLURALISME AGAMA Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran John Hick*.
- Haq, M. N. (2022). Anatomi Dan Literasi Post-Truth. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 2(2), 99–114.
- Hick, J. H. (1985). *Problems of religious pluralism*. Springer.
- Martini, T., & Kaize, S. T. (2025). *NARASI KEAGAMAAN DALAM ERA POST-TRUTH: ANALISIS HERMENEUTIKA DIGITAL TERHADAP TOKOH AL MOFU DAN PATRIS ALLEGRO DI TIKTOK*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4243–4254.
- Muzakki, F. R. (2024). *MEMAHAMI SEBAGAI MEMBEBAK: HABERMAS DAN HERMENEUTIK KRITIS*. *KUASA KATA*, 37.
- Noor, I. (2012). Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 61–87.
- P, M. A. C., Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., Abadi, A., Efitra, E., & Sepriano, S. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yp7NEAAAQBAJ>
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., & Alam, M. D. S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=thZkEAAAQBAJ>
- Rifai, S., Syafik, M., Barnaba, M., Ilahi, R., Alwi, A. H., Bissri, M., Analisis, P., Kritis, J., Habermas, S., Rifai, M., Syafik, R., Najib, B., Sunan, U., & Surabaya, A. (2023). *Analisis Pemikiran Kritis Jurgen Habermas*. 7(7), 10. <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v6i6>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1).
- Syuhada, K. D. (2018). Etika media di era “post-truth.” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1), 8.
- Waston, M. (2025). *Filsafat Post-Truth: Krisis Kebenaran dan Tantangan Rasionalitas di Era Digital*. Muhammadiyah University Press.